

## **ABSTRAK**

### **INOVASI KEGIATAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (PBDT) 2015 MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENETAPAN SASARAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**WIDJI RAMADANI**

Inovasi pada kegiatan PBDT 2015 dalam wujud partisipasi masyarakat dilakukan karena dalam kegiatan sebelumnya masih banyak terjadi kesalahan pada data yang didapat sehingga dilakukan inovasi dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya. Kegiatan ini berdasarkan Inpres No. 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan inovasi yang dilakukan BPS dalam wujud partisipasi masyarakat dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada pelaksanaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada kegiatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini masyarakat berperan aktif dan berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Tetapi masih ditemukan kendala pada pelaksanaannya, hal tersebut dikarenakan pada petugas pencacah di lapangan yang dalam pengerjaannya kurang teliti sehingga menimbulkan masalah pada proses pengolahan data. Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu faktor internal yang terdiri dari pendidikan, usia dan pekerjaan. dan faktor eksternal yang terdiri dari fasilitas dan kepemimpinan pemerintah. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan PBDT 2015.

Rekomendasi yang peneliti berikan, yaitu menguatkan partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan, inovasi harus lebih ditingkatkan melalui aplikasi program

yang ada, pelatihan petugas lapangan dilakukan lebih lama, pengawasan dilakukan secara merata dan berkala.

Kata kunci: Reformasi administrasi, reformasi birokrasi, inovasi, partisipasi masyarakat, kemiskinan

## **ABSTRACT**

### **THE INNOVATION OF UPDATING THE UNIFIED DATABASE 2015 ACTIVITIES THROUGH COMMUNITY PARTICIPATION IN DETERMINING THE TARGET OF SOCIAL PROTECTING AND PROVERTY REDUCTION PROGRAM**

**(Study case at Badan Pusat Statitik Kota Bandar Lampung)**

**By**

**WIDJI RAMADANI**

The innovation on the activity of PBDT 2015 in community participation was done because there were many mistakes on the previous activities in the obtaining data, so innovation should be done by the presence of community participation in the activities implementation. This activity was based on Impres No. 7 year 2014 on the implementation of the social protection programs and poverty reduction.

The purpose of this research is to describe the innovation that had been done by BPS in a community participation and the forms of community participation on the implementation of activity also the factors that affecting community participation on those activity. The methods that used on this research is a qualitative approach. The data collection techniques that used for this research are interview, observation and documentation.

Based on its case, it indicates that community participation on those activity has an active role and works well by the rules. But, the obstacle still can be found on the implementation, because the enumerators, who work in the field, were inaccurate in their work so that causing some problems on the data processing. There are some factors that can be affecting community participation, which are internal factors that consisting of education, age and occupation. And external factors that consisting of facilities and government leadership. Those factors are affecting the success of activity of PBDT 2015.

The recommendations that given by the researcher are community participation in decision-making should be strengthened, innovation should be increased through

program application, training for field officers should be held longer, the surveillance should be conducted evenly.

Key words: Administrative reform, bureaucratic reform, innovation, community participation, poverty